BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 100.3/ 29 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI
TAHUN 2026

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :

a. bahwa guna ketertiban pemenuhan kebutuhan produk hukum daerah khususnya Peraturan Bupati tahun 2026 perlu menyusun perencanaan pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam bentuk Program Pembentukan Peraturan Bupati tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, guna menyusun Peraturan Bupati perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2026
BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Tembusan:
1. Inspektur Daerah; dan
2. Kepala Bagian Hukum Setda.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 100.3/ 29 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2026

No	Tentang	Materi Pokok	Perangkat Daerah
1.	Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar	Penyesuaian Pedoman Pengelolaan Aduan dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Karanganyar	Penegasan Status Operasional dan Pembiayaan LPPL Swiba	Dinas Komunikasi dan Informatika
3.	Standar Harga Tahun Anggaran 2027	Memuat SSH, SBU, ASB dan HSPK Tahun 2026	Badan Keuangan Daerah
4.	Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Standar Harga 2026	Perubahan SSH, SBU, HSPK dan ASB 2026	Badan Keuangan Daerah
5.	Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2026	Badan Keuangan Daerah
6.	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2026	Badan Keuangan Daerah
7.	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati tentang Standar Harga 2026	Perubahan SSH, SBU, HSPK dan ASB 2026	Badan Keuangan Daerah
8.	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Badan Keuangan Daerah
9.	Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Badan Keuangan Daerah
10.	Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	Badan Keuangan Daerah

11.	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Badan Keuangan Daerah
12.	Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah. (Mencabut Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah)	Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan Daerah
13.	Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah. (Mencabut Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah)	Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan Daerah
14.	Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perubahan Perbup Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retibusi Daerah	Perubahan Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Keuangan Daerah
15.	Penanaman Modal	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal	DPMPTSP
16.	Rencana Umum Penanaman Modal	Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal	DPMPTSP
17.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan	Merupaka delegasi penyusunan peraturan bupati oleh Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan	DPMPTSP

18.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Merubah ketentuan SOP pada DPMPTSP	DPMPTSP
19.	Bela Beli Produk Karanganyar	Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bela Beli Produk Karanganyar	a. Disdagperinaker b. Diskuktrans ESDM
20.	Program Arsip Vital	Mengatur tentang identifikasi arsip vital, penataan, perlindungan dan pengamanan arsip vital, penyelamatan dan pemulihan arsip vital, akses dan layanan arsip vital	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
21.	Sistem Kearsipan Daerah	Aplikasi kearsipan Dinamis dan Simpul jaringan SIKN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
22.	Organisasi Kearsipan	Kedudukan dan Tugas Fungsi Lembaga Kearsioan Daerah, Unit Kearsipan, dan Unit Pengolah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
23.	Perpustakaan Umum Kabupaten Karanganyar	Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan meliputi pengurusan, perancanaan, pelaksanaan dan pengawasan agar memenuhi standar nasional perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
24.	Perubahan Tarif Retribusi Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat	Perubahan sub komponen dalam Perda PDRD	Dinas Kesehatan
25.	Peraturan Bupati Karanganyar tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat	Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa di UPT Puskesmas	Dinas Kesehatan
26.	Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian PegawaiBadan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat	Mengatur tentang Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan

27.	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat	Penambahan pengaturan tentang remunerasi bagi PPPK Paruh Waktu	Dinas Kesehatan
28.	Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 36 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar	Perubahan aturan tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah	RSUD Kartini
29.	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah	Merubah ketentuan terkait penyesuaian administrasi dan penggunaan logo RSUD Kartini	RSUD Kartini
30.	Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kerjasama Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar	Perubahan aturan tentang Pelaksanaan Kerjasama di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah	RSUD Kartini
31.	Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar	Perubahan aturan Pola Tata Kelola BLUD RSUD disesuaikan dengan kondisi di Rumah Sakit	RSUD Kartini
32.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 73 tentang Remunerasi BLUD RSUD	Perubahan aturan tentang Remunerasi yang diterapkan di BLUD RSUD	RSUD Kartini
33.	Pengelolaan Barang BLUD RSUD	Aturan tentang pengelolaan barang yang bersumber dari anggaran BLUD RSUD	RSUD Kartini
34.	Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD	Aturan terkait pelaksanaan anggaran di BLUD RSUD	RSUD Kartini
35.	Investasi BLUD RSUD	Aturan tentang Investasi di BLUD RSUD	RSUD Kartini
36.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah	Menambahkan ketentuan tentang penetapan tarif layanan sementara	RSUD Kartini
37.	Perubahan Tarif Retribusi Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah	Penambahan detail rincian objek retribusi yang belum masuk dalam Perda PDRD	RSUD Kartini

38.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non-ASN pada BLUD RSUD	Perubahan pengaturan terkait pengadaan, pengangkatan, dan pemberhentian Pegawai Non-ASN BLUD RSUD	RSUD Kartini
39.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD	Perubahan pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa di BLUD RSUD	RSUD Kartini
40.	Utang dan Piutang BLUD RSUD	Pengaturan mengenai utang dan piutang di BLUD RSUD	RSUD Kartini
41.	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar	a. Maksud dan Tujuan b. Sasaran c. Organisasi Pelaksanaan d. Mekanisme Penyelenggaraan e. Pelaporan f. Monitoring dan Evaluasi g. Pendanaan h. Ketentuan Lain-Lain i. Penutup	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
42.	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Karanganyar Tahun 2026-2046	Pengaturan mengenai rencana struktur ruang, rencana pola ruang, ketentuan penataan ruang, pengaturan zonasi dan kelembagaan pengawasan pola ruang di kawasan perkotaan Karanganyar	DPUPR
43.	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan Colomadu Tahun 2026-2046	Pengaturan mengenai rencana struktur ruang, rencana pola ruang, ketentuan penataan ruang, pengaturan zonasi dan kelembagaan pengawasan pola ruang di Kecamatan Colomadu	DPUPR
44.	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan Tawangmangu Tahun 2026-2046	Pengaturan mengenai rencana struktur ruang, rencana pola ruang, ketentuan penataan ruang, pengaturan zonasi dan kelembagaan pengawasan pola ruang di Kecamatan Tawangmangu	DPUPR
45.	Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Dalam Rangka Pemberdayaan Karang Taruna di Kbaupaten Karanganyar	a. Tujuan dan Sasaran b. Persyaratan administratif c. Besaran d. Pelaksanaan e. Monitoring dan Evaluasi	Dinas Sosial
46.	Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar	Penilaian ASN berdasarkan ketentuan Pasal 6 Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022	BKPSDM

47.	Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sampah	Petunjuk dan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
48.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup	a. Kedudukan b. Susunan Organisasi c. Tugas dan Fungsi d. Kepegawaian e. Tata Kerja	Bagian Organisasi Setda
49.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika	a. Kedudukan b. Susunan Organisasi c. Tugas dan Fungsi d. Kepegawaian e. Tata Kerja	Bagian Organisasi Setda
50.	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Utaian Tugas Jabatan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas pada Dinas dan Badan Daerah	Mengubah Uraian Tugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Bagian Organisasi Setda
51.	Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	Kebutuhan jabatan atau formasi dari jumlah dan jenisnya	Bagian Organisasi Setda
52.	Uraian Tugas Jabatan Administrator dan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar	Uraian Tugas Jabatan Administrator dan Pengawas pada RSUD Kartini	Bagian Organisasi Setda
53.	Uraian Tugas Jabatan Pengawas pada Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Uraian Tugas Jabatan Pengawas pada Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Bagian Organisasi Setda
54.	Penetapan Kelas Jabatan	Penyesuaian Kelas Jabatan berdasarkan persetujuan kelas jabatan dari Menteri PANRB	Bagian Organisasi Setda
55.	Penetapan Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana	Penyusunan standar kompetensi jabatan pelaksana	Bagian Organisasi Setda
56.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan	a. Kedudukan b. Susunan Organisasi c. Tugas dan Fungsi d. Kepegawaian e. Tata Kerja	Bagian Organisasi Setda
57.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	a. Kedudukan b. Susunan Organisasi c. Tugas dan Fungsi d. Kepegawaian e. Tata Kerja	Bagian Organisasi Setda
58.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah	a. Kedudukan b. Susunan Organisasi c. Tugas dan Fungsi d. Kepegawaian e. Tata Kerja	Bagian Organisasi Setda

59.	Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara	Pengaturan mengenai pemberian tambahan penghasil pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar	Bagian Organisasi Setda
60.	Standar Pelayanan Minimal Desa	Menetapkan Standar Operasional Pelayanan di Desa	Dispermades
61.	Penetapan Batas Desa Kecamatan Jenawi	Menetapkan dan menegaskan batas desa di Kecamatan Jenawi	Dispermades
62.	Penetapan Batas Desa Kecamatan Tawangmangu	Menetapkan dan menegaskan batas desa di Kecamatan Tawangmangu	Dispermades
63.	Penetapan Batas Desa Kecamatan Jatiyoso	Menetapkan dan menegaskan batas desa di Kecamatan Jatiyoso	Dispermades
64.	Penetapan Batas Desa Kecamatan Jatipuro	Menetapkan dan menegaskan batas desa di Kecamatan Jatipuro	Dispermades
65.	Penetapan Batas Desa Kecamatan Ngargoyoso	Menetapkan dan menegaskan batas desa di Kecamatan Ngargoyoso	Dispermades
66.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pedoman Hari Kerja, Jam Kerja, dan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Merubah ketentuan mengenai pakaian dinas perangkat desa	Dispermades
67.	Tata Naskah Dinas di Desa	Menetapkan tata naskah dinas di Lingkungan pemerintah desa	Dispermades
68.	Perubahan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	a. Ketentuan pemberian honor/penghasilan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa (PPKD, PKPKD, THR) b. Penambahan tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan c. Penghapusan ketentuan tentang penghasilan perangkat desa yang berstatus PNS	Dispermades
69.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok	Mengubah ketentuan tentang pemanfaatan hasil pengelolaan tanah bengkok dan ketentuan peralihan	Dispermades
70.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	Mengubah ketentuan penatausahaan dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan bagaimana penggunaan dana bantuan keudangan kepada Pemerintah Desa	Dispermades

71.	Pedoman Penyusunan Standar Satuan Harga di Desa	Pedoman Penyusunan Standar Satuan Harga di Desa	Dispermades
72.	Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2026	Petunjuk teknis dan kebijakan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026	Dispermades
73.	Perubahan Perbup Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa	Perubahan ketentuan dalam Lampiran menyesuaikan dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa	Dispermades
74.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kepada Desa	Perubahan ketentuan tentang penentuan alokasi bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa	Dispermades
75.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Pengajar Keagamaan Nonformal dan Penjaga Rumah Ibadah	Perubahan beberapa pasal terkait syarat dan tata cara pemberian insentif	Bagian Kesra Setda
76.	Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	a. Pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. b. Pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dalam upaya pencapaian SPM di Daerah.	Bagian Pemerintahan Setda

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO